



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

## PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT DALAM MONITORING DAN EVALUASI RB

Senin, 29 Agustus 2022  
*Smart Discussion Series Tematik 4*

**Ahmad Miftakhul Khoiri, S.AP, M.AP**



SmartID



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

AHMAD MIFTAKHUL KHOIRI, S.AP., M.AP

## Riwayat Pendidikan

- **Sarjana Administrasi Publik (S.AP)**  
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- **Magister Administrasi Publik (M.AP)**  
Fakultas Ilmu Administrasi universitas Brawijaya

## Pengalaman Menjadi Tenaga Ahli

1. Melakukan beberapa Penelitian di BNPB sejak 2015 hingga 2020
2. Tim pendamping dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota sejak 2017 hingga 2021
3. Tim pendamping dalam penyusunan Renstra PD sejak 2017-2021
4. Tim Tenaga Ahli Penyusunan Penilaian Budaya Cettar Provinsi Jatim 2021
5. Tim Tenaga Ahli penyusunan Proses Bisnis Provinsi Jatim 2021
6. Narasumber Workshop SAKIP KEMENDES PTD 2021
7. Tenaga Ahli Pendampingan SAKIP Prov DKI Jakarta 2021
8. Tim Tenaga Ahli Penilai IKK Kabupaten Sidoarjo 2021
9. Narasumber Workshop Reformasi Birokrasi DKP JATIM 2022
10. Narasumber FGD RB dan ZI Itdjend Kementerian Kominfo 2022



Chief Product & Technology Officer  
Tenaga Ahli SMARTID



SmartID



**SMART  
DISCUSSION**  
SERIES 2022

# Administrative Reform

The phrase 'administrative reform' has been widely used with at least two broad meanings.

1. In one regard it has been synonymous with **administrative change**, describing the variety of important revisions of administrative practice and organization (*perubahan administratif, menggambarkan berbagai revisi penting dari praktik administrasi dan organisasi*) that all administrative entities engage in from time to time.
2. A different use of the phrase has grown out of **efforts to assist in the modernisation of new and developing nations** (*upaya untuk membantu modernisasi negara-negara baru dan berkembang*)

Source : Roderick T. Groves. (1976) Administrative Reform and Political Development.



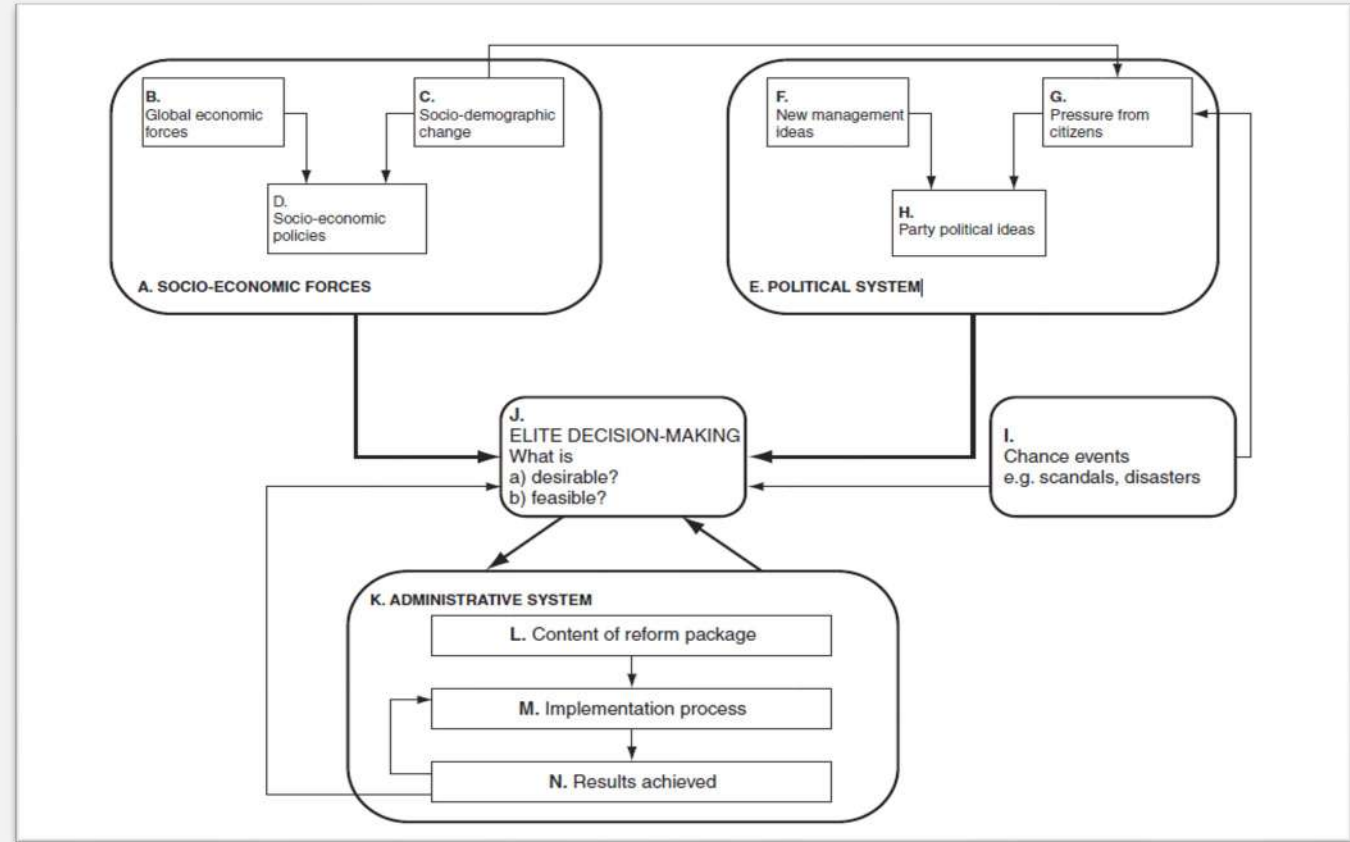


SmartID



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

# A Model Of Public Management Reform



Source : Geert Bouckaert and Christopher Pollit, 2013, Comparative Analysis Public Management Reform





SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## Grand Design Reformasi Birokrasi

### Pemerintahan Kelas Dunia

#### Penguatan lima tahun pertama (2010-2014)



Penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka: mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

#### Penguatan lima tahun kedua (2015-2019)



Implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, juga melanjutkan upaya yang belum dicapai pada lima tahun pertama pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah

#### Penguatan lima tahun ketiga (2020-2024)



Peningkatan secara terus-menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia



Sumber: Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020



SmartID



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

## Perkembangan dan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

- Efektif, efisien dan ekonomis
- Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)
- Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik
- Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi
- Terbangunnya budaya kinerja organisasi dan individu

**Visi**  
Menjadi  
Pemerintahan  
Kelas Dunia

**DYNAMIC GOVERNANCE**

**2024**

Roadmap 2020-2025  
**Periode III**

**2019**

**PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY**

Roadmap 2015-2019  
**Periode II**

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:

- tidak ada korupsi;
- tidak ada pelanggaran;
- APBN dan APBD baik;
- semua program selesai dengan baik;
- semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
- komunikasi dengan publik baik;
- penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
- penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
- hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, prolapsangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)

**RULE BASED BUREAUCRACY**

**2014**

Roadmap 2010-2014  
**Periode I**

**2010**

Perpres No. 81 Th. 2010

**Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025**

Sumber: KemenpanRB

Terbangunnya regulasi-regulai yang menjadi landasan yang kuat untuk menjamin implementasi RB yang konsisten dan berkesinambungan

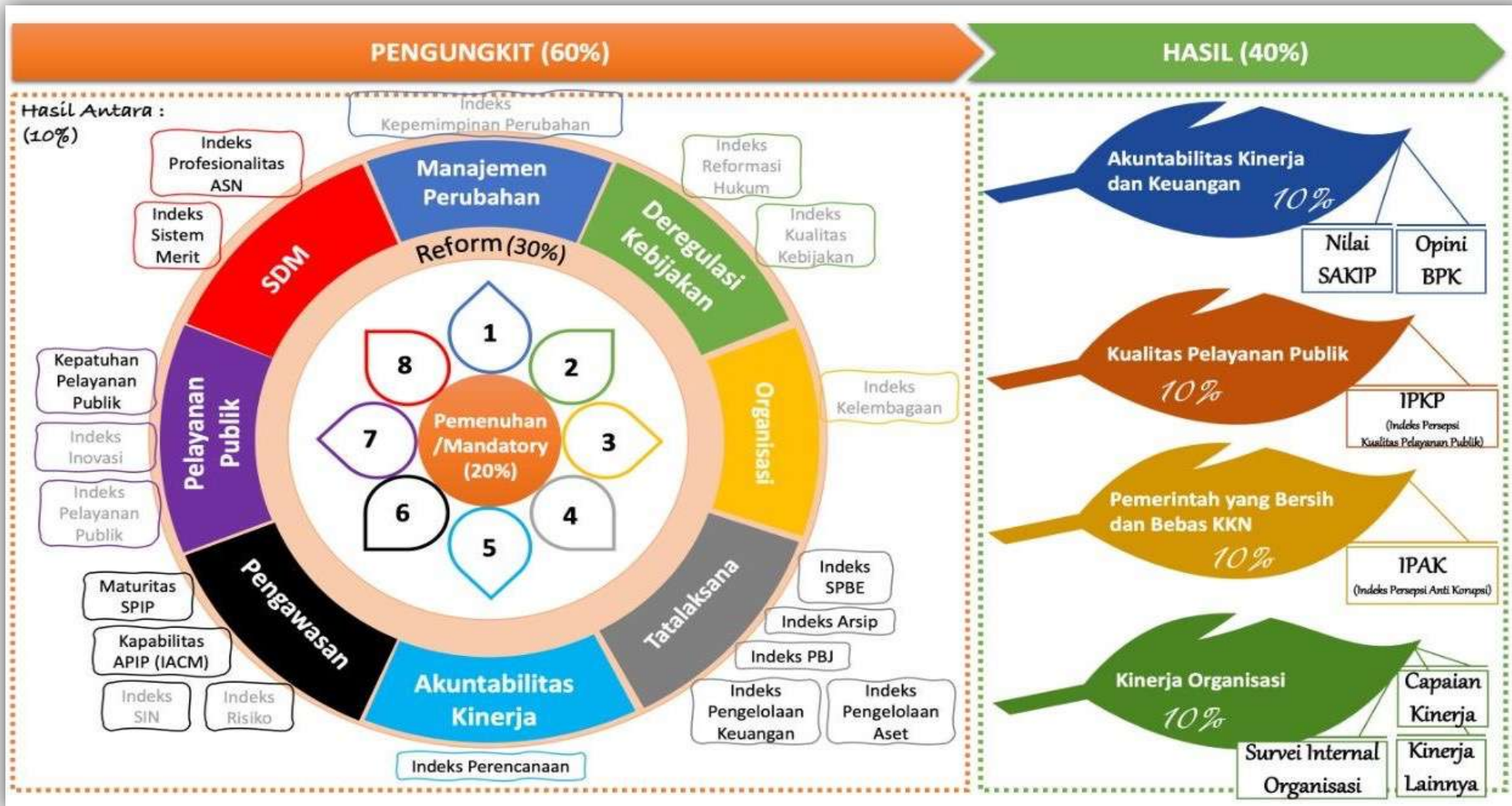


SmartID



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

# Model Penilaian Reformasi Birokrasi







SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## Area Manajemen Perubahan

### Aspek Pengungkit

TIM REFORMASI  
BIROKRASI

ROADMAP  
REFORMASI  
BIROKRASI

PERUBAHAN  
POLA IKIR DAN  
BUDAYA KINERJA

**MANAJEMEN  
PERUBAHAN**

PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI REFORMASI  
BIROKRASI

### Aspek Reform

**KOMITMEN DALAM  
PERUBAHAN**

- Jumlah Agen Perubahan
- Jumlah Perubahan yang dibuat
- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen

**KOMITMEN PIMPINAN**

**MEMBANGUN BUDAYA  
KERJA**







SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## Area Deregulasi Kebijakan

### Aspek Pengungkit

DILAKUKANNYA IDENTIFIKASI, ANALISIS, DAN PEMETAAN TERHADAP KEBIJAKAN YANG TIDAK HARMONIS/ SINKRON/ BERSIFAT MENGHAMBAT YANG AKAN DIREVISI/ DIHAPUS

DILAKUKANNYA REVISI KEBIJAKAN YANG TIDAK HARMONIS/ TIDAK SINKRON/ BERSIFAT MENGHAMBAT

**DEREGULASI  
KEBIJAKAN**

**HARMONISASI**

### Aspek Reform

KEBIJAKAN YANG DITERBITKAN MEMILIKI PETA KETERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN LAINNYA

**PERAN  
KEBIJAKAN**

KEBIJAKAN TERKAIT PELAYANAN DAN ATAU PERIZINAN YANG DITERBITKAN MEMUAT UNSUR KEMUDAHAN DAN EFISIENSI UTAMA UNIT KERJA



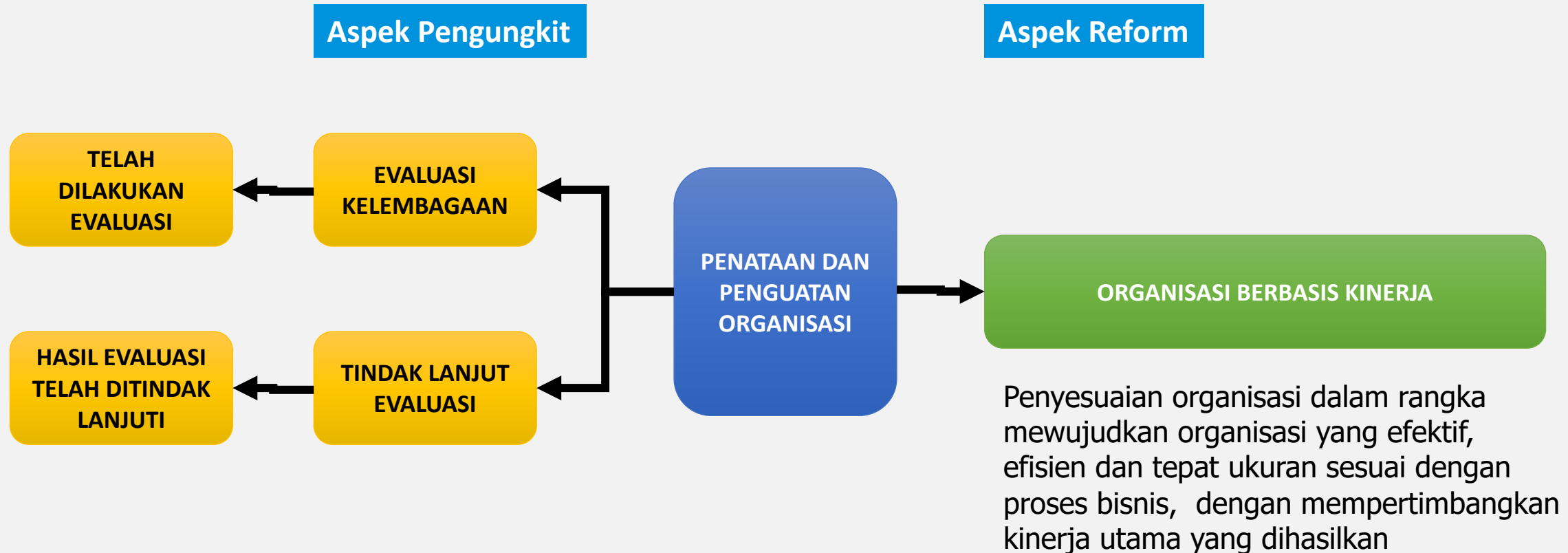


SmartID



**SMART  
DISCUSSION**  
SERIES 2022

# Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi





SmartID



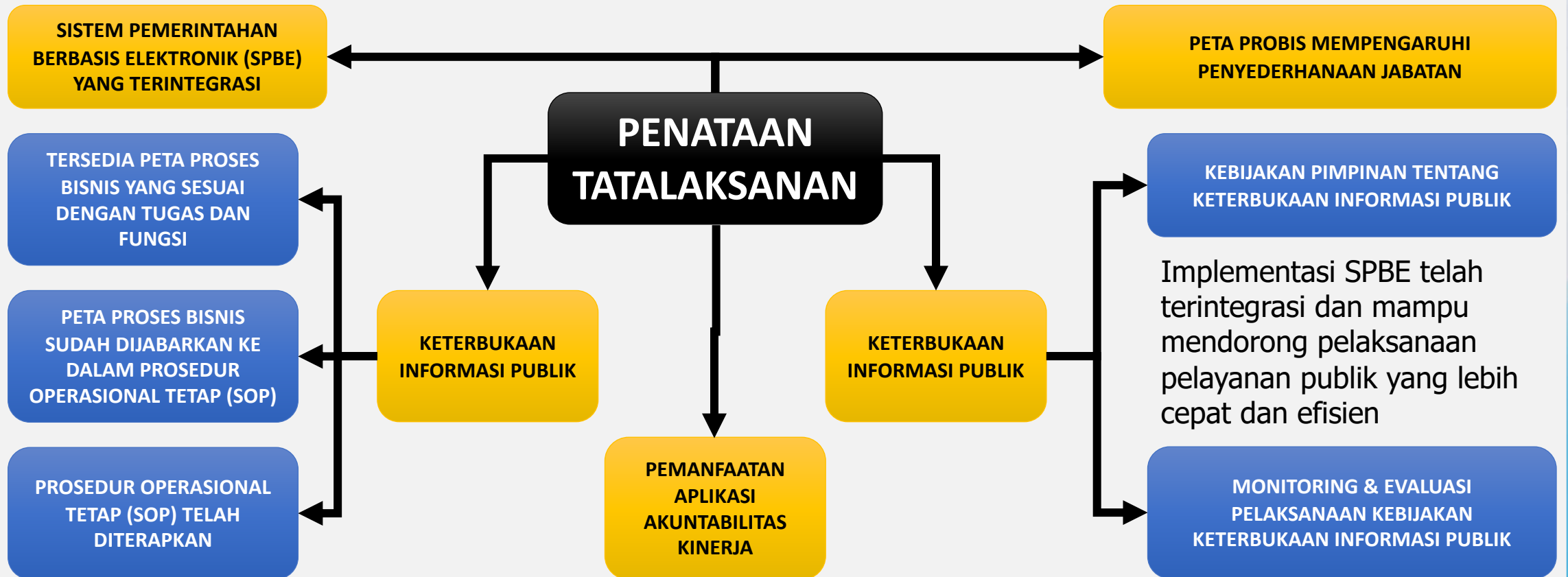
# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## Area Perubahan Penataan Tatalaksana

### Aspek Pengungkit

### Aspek Reform





SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM

### Aspek Pengungkit

- PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
- PROSES PENERIMAAN PEGAWAI TRANSPARAN, OBJEKTIF, AKUNTABEL DAN BEBAS KKN
- PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI
- PROMOSI JABATAN DILAKUKAN SECARA TERBUKA
- PENETAPAN KINERJA INDIVIDU
- PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN/KODE ETIK/KODE PERILAKU PEGAWAI
- PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN
- SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

**PENATAAN  
SISTEM  
MANAJEMEN  
SDM  
APARATUR**

### Aspek Reform

- KINERJA INDIVIDU**  
Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (*outcome*) sesuai pada levelnya
- ASSESSMENT PEGAWAI**  
Hasil *assessment* telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai
- PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI**





SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas



### Aspek Pengungkit

KETERLIBATAN  
PIMPINAN

PENGELOLAAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA

PENGUATAN  
AKUNTABILITAS

### Aspek Reform

EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI  
ANGGARAN

- Persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih
- Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:

PEMANFAATAN APLIKASI  
AKUNTABILITAS KINERJA

PEMBERIAN *REWARD AND PUNISHMENT*

KERANGKA LOGIS KINERJA



SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## Area Perubahan Penguatan Pengawasan

### Aspek Pengungkit

GRATIFIKASI

PENERAPAN SPIP

PENGADUAN MASYARAKAT

WHISTLE BLOWING SYSTEM

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

PENGUATAN PENGAWASAN

### Aspek Reform

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

MEKANISME PENGENDALIAN AKTIVITAS

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti
- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses
- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

PERAN APIP

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

### Aspek Pengungkit

STANDAR PELAYANAN

BUDAYA PELAYANAN PRIMA

PENGELOLAAN PENGADUAN

PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

### Aspek Reform

UPAYA DAN/ATAU INOVASI TELAH MENDORONG PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

UPAYA DAN/ATAU INOVASI PADA PERIJINAN/PELAYANAN TELAH DIPERMUDAH

Upaya dan/atau inovasi pada perizinan atau pelayanan telah dipermudah:

1. Waktu lebih cepat
2. Alur lebih pendek/singkat
3. Terintegrasi dengan aplikasi

PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN



SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

# KENDALA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA



Komitmen pimpinan dalam monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan masih minim



RB kerap dipandang sekedar formalitas dan pemenuhan dokumen semata



Ego Sektoral yang membuat pelaksanaan RB masih parsial



Komitmen *leading institution* untuk mengawal program RB Nasional belum komprehensif hingga level bawah



RB belum berdampak signifikan pada capaian pembangunan nasional dan penyelesaian isu hilir





SmartID



**SMART  
DISCUSSION**  
SERIES 2022

# Peran Strategis Inspektorat dalam Pelaksanaan Penilaian RB

01

## Koordinator

Menjadi Koordinator dalam Penilaian Mandiri RB Internal  
(Pasal 4 (1) permenpan 26/2020)

## Reviu

Melakukan Reviu atas hasil PMPRB di satuan Kerja atau unit (pasal 5 (1) Permenpan 26/2020)

02

## Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Road Map RB  
(Permenpan 25/2020)

03



SmartID



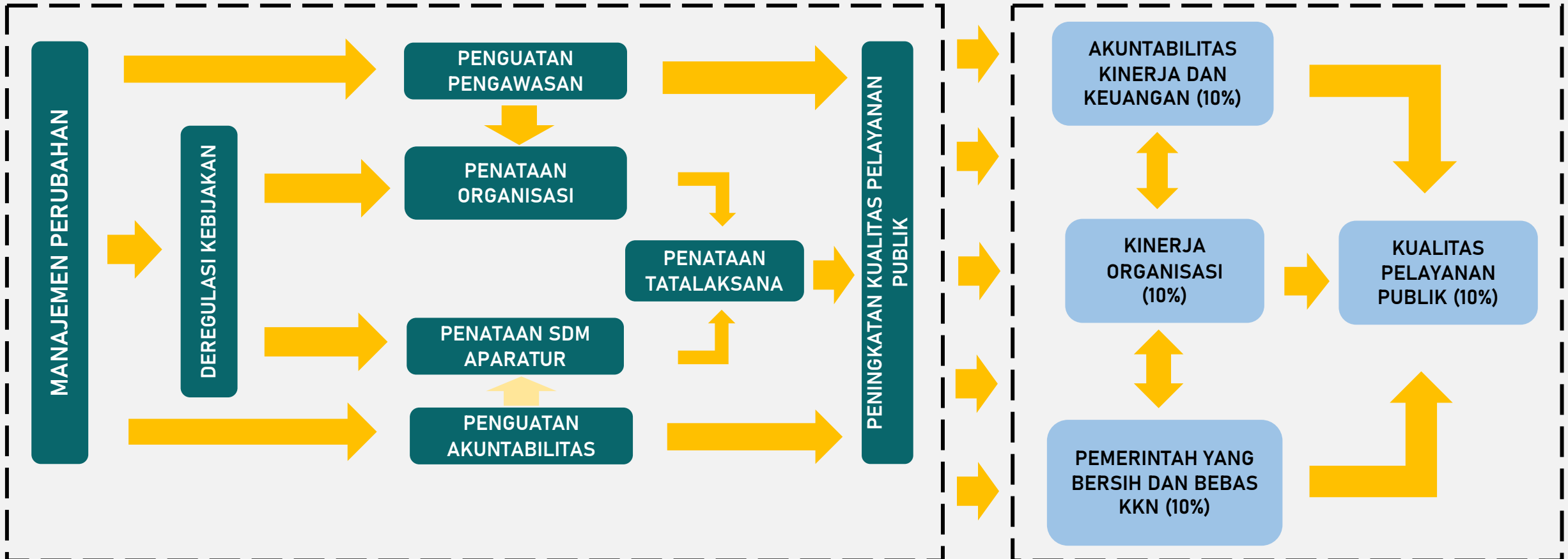
# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## Memahami Fokus Area Perubahan Prioritas dalam Melakukan RB

### PENGUNGKIT (60%)

### HASIL (40%)





SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi





SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## Fokus Pada BEFORE-REFORM-AFTER

Perizinan impor barang SNI dilakukan setiap pengapalan melalui mekanisme Surat Pendaftaran Barang (SPB)

Pembentukan BPSK dilakukan oleh Presiden

Persyaratan pendirian Unit Metrologi Legal (UML) sangat ketat berupa persyaratan SDM & Peralatan

Pemeriksaan persyaratan impor barang dilakukan di dalam Kawasan kepabeanan menyebabkan *dwelling time*

### KONDISI SEBELUM

SPB dihapus digantikan dengan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)  
[Permendag 81/2019]

Pembentukan BPSK dialihkan kepada Gubernur dan didaftarkan kepada Menteri Perdagangan [Permendag 72/2020]

Penyederhaan persyaratan jumlah SDM dan ruang lingkup peralatan  
[Permendag 105/2018]

Pengalihan pemeriksaan persyaratan impor di luar kawasan pabean (post border)  
[Permendag 51/2020]

### DEREGULASI

Masa berlaku perizinan menjadi lebih Panjang (4 Tahun atau sesuai masa berlaku SPPT SNI), mengurangi frekuensi perizinan dan *dwelling time* akibat izin yang belum keluar

Proses pembentukan BPSK menjadi lebih cepat dan meningkatkan *awareness* Pemda terhadap BPSK yang berdampak pada penyelesaian sengketa konsumen di daerah dapat dengan cepat dan murah sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi

Jumlah UML yang terbentuk meningkat dari 97 (2017) menjadi 326 (2020.) Tingkat UTPP di tera/tera ulang meningkat 10,74% pada tahun 2019 sehingga konsumen mendapatkan jaminan kebenaran pengukuran yang lebih baik

Proses importasi menjadi lebih cepat, *dwelling time* diperkirakan menurun 0,9 – 1,1 hari untuk importir risiko rendah (Widijawan, 2019)

### DAMPAK





SmartID



**SMART  
DISCUSSION**  
SERIES 2022

# Lakukan Siklus Money Secara Konsisten dan Berkala





SmartID



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

## Penguatan Pada QUICK WINS

### TUJUAN

Adanya sebuah tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya.

*Quick Wins* dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat



Quick Win Mandatory	Quick Win Mandiri
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi Quick Win K/L/Pemda;</li> <li>- Quick Win lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing K/L/Pemda</li> </ul>

Sumber: Permenpan Nomor 25 Tahun 2020

*Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

*Terima Kasih*

Visit Us :



smartid\_



Smart ID



smartid\_



SmartID



smartid.co.id